



DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM P₃KUM TERHADAP KINERJA DAN KELAYAKAN USAHA KOPERASI DI KOTA SEMARANG

Dyah Maya Nihayah✉

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi UNNES Semarang

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>

Received : 2013; Accepted: 2013; Published: September 2013

Abstract

During this time the cooperative performance measurement is done by conventional financial terms based on financial statements, profitability, liquidity and solvency (RLS) as well as the implementation of the budget. This study aims to determine the performance and feasibility of KSP / USP- Cooperative as a recipient of a revolving fund P₃KUM and want to know the impact of the implementation of the cooperative program P₃KUM dealer. The aspect that is evaluated in terms of organizations and institutions that include; (1) The vision and mission, (2) Legality of business entities, (3) The cooperative structure, (4) Management organization (5) Human Resources Development (HRD), (6) Finance, (7) Infrastructures. The method used is the Cooperative Capacity Assessment (CCA). Respondents in this study is a cooperative that had received funds P₃KUM, already incorporated and has implemented the Annual Member Meeting in 2010 and has a complete cooperative (management and members of the cooperative). From the results of this study concluded that of the 25 cooperative respondents, 20% cooperatives have a good performance appraisal at all and 80% are good .. The better the performance of which is owned by a cooperative, the more worthy of him as a funding channel P₃KUM program. Feasibility is very important to ensure the success of the program P₃KUM. However, the necessary guidance and supervision of the relevant authorities, so that the existence of the program run effectively and efficiently.

Keywords: performance, organizations, institutions, cooperatives, CCA, P₃KUM

Abstrak

Selama ini pengukuran kinerja koperasi dilakukan dengan cara konvensional yaitu dari segi keuangan berdasarkan laporan keuangan, rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas (RLS) serta pelaksanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan kelayakan usaha KSP/ USP- Koperasi sebagai penerima dana bergulir P₃KUM dan ingin mengetahui dampak pelaksanaan program P₃KUM terhadap koperasi penyalur. Adapun aspek yang dievaluasi adalah dari sisi organisasi dan kelembagaan yang meliputi; (1) Visi dan misi, (2) Legalitas badan usaha, (3) Struktur koperasi, (4) Manajemen organisasi (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), (6) Keuangan, (7) Sarana dan Prasarana. Metode yang digunakan adalah Cooperative Capacity Assessment (CCA). Responden dalam penelitian ini adalah koperasi yang pernah menerima dana P₃KUM, sudah berbadan hukum dan sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2010 serta memiliki kelengkapan koperasi (pengurus dan anggota koperasi). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari 25 koperasi yang menjadi responden, 20% koperasi memiliki penilaian kinerja yang baik sekali dan 80% lainnya baik.. Semakin baik kinerja yang dimiliki oleh sebuah koperasi, maka akan semakin layak dia sebagai penyalur dana program P₃KUM. Kelayakan usaha ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan dari program P₃KUM. Meski demikian, diperlukan pembinaan dan pengawasan dari aparat terkait, supaya keberadaan program berjalan efektif dan efisien.

Kata Kunci: kinerja, organisasi, kelembagaan, koperasi, CCA, P₃KUM

How to Cite: Dyah Maya Nihayah. (2013). Dampak Pelaksanaan Program P₃KUM Terhadap Kinerja Dan Kelayakan Usaha Koperasi. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6 (2): 103-213 doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596

© 2013 Semarang State University. All rights reserved

PENDAHULUAN

Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, tujuan koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 pasal 3, berbunyi: "memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945". Oleh karena itu, koperasi sebagai badan usaha memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan efektifitas kegiatan usahanya terutama efektifitas operasional, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001). Koperasi dianggap menjawab tantangan global dan kritik terhadap ekonomi yang menjurus ke pasar bebas. Goener et al (2009) menyatakan bahwa konsep neoliberal telah menjadikan dunia jatuh ke krisis ekonomi global tahun 2008.

Usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi dewasa ini menghadapi beragam tantangan dan dihadapkan pada tuntutan untuk menghadapi era globalisasi. Perubahan besar pada aktivitas ekonomi seperti liberalisasi perdagangan, pergerakan modal dan teknologi informasi merupakan tantangan yang harus dijawab oleh institusi koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Lesakova (2009).

Pengukuran kinerja koperasi sering dilakukan dengan metode konvensional yaitu terbatas dari segi keuangan dalam bentuk penilaian berdasarkan laporan keuangan, Rentabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas (RLS) serta pelaksanaan anggaran. Ukuran secara finansial tersebut belum mampu mencerminkan kompleksitas dalam organisasi bisnis. Pengukuran kinerja seperti ini memiliki beberapa kelemahan antara lain yaitu (1) ketidakmampuan untuk mengukur kinerja harta tak tampak (intangible assets) dan harta intelektual (Intellectual Property) misalnya sumber daya manusia, (2) kinerja yang diukur secara

keuangan hanya mampu bercerita mengenai masa lalu organisasi bisnis dan tidak mampu sepenuhnya menuntun mereka ke arah yang lebih baik (Riani, 2007).

Mengacu pada hal tersebut, diperlukan pengukuran yang menyeluruh, yaitu pengukuran kinerja yang tidak hanya mengukur kinerja keuangan namun mampu menggambarkan kondisi koperasi secara lengkap, jelas dan akurat terutama menyangkut sumber daya manusia yang diintegrasikan dalam perencanaan baik organisasi maupun usaha. Untuk itu diperlukan penyempurnaan sistem penilaian kinerja koperasi yang lebih komprehensif.

Evaluasi kinerja koperasi penting dilakukan mengingat pemerintah mengeluarkan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM). P3KUM merupakan program pemerintah yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi untuk mengembangkan usaha mikro anggota koperasi dengan menggunakan dana bergulir konvensional. Mengingat besarnya dana masyarakat yang digulirkan dalam program ini, maka kelayakan usaha KSP/USP-Koperasi mutlak dilakukan. Hasil evaluasi kinerja digunakan untuk menelaah secara mendalam mengenai aspek-aspek kelembagaan, manajemen dan keuangan serta pencapaian yang diperoleh setelah mendapatkan dana bergulir P3KUM. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dan kelayakan usaha KSP/USP-Koperasi sebagai penerima dana bergulir P3KUM.

Salah satu penelitian yang mencoba melihat kinerja organisasi tidak hanya dari sisi finansial dilakukan oleh Sinaga (2004). Dia mengemukakan pendapat bahwa pengukuran kinerja suatu badan usaha, hendaknya tidak hanya dilihat dari satu aspek saja melainkan dari empat perspektif yakni dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pengembangan (proses belajar dan berkembang). Dalam hal ini dapat dikatakan penilaian kinerja organisasi usaha terdiri dari perspektif keuangan dan

non keuangan. Oleh karena itu dalam penelitiannya digunakan metode balanced scorecard.

Keunggulan pengukuran kinerja organisasi dengan menggunakan metode balanced scorecard dalam sistem perencanaan strategik adalah organisasi tersebut mempunyai karakteristik (1) komprehensif, (2) koheren, (3) seimbang dan (4) terukur. Tiap-tiap unsur dalam dinamika organisasi saling berkaitan dan kejelian melihat itu merupakan kemampuan mengubah potensi menjadi produk yang riil.

Sementara itu berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM juga diungkap bahwa pemeringkatan kinerja koperasi perlu penyempurnaan supaya kepercayaan dari stakeholder dapat meningkat. Hal ini disebabkan karena penilaian kinerja koperasi selama ini bias ke arah aspek usaha koperasi saja tanpa memperhatikan aspek kelembagaan koperasi. Padahal aspek kelembagaan harusnya memiliki bobot yang tidak kalah tinggi karena merupakan pondasi untuk pengembangan usaha koperasi sesuai dengan nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi. Dalam badan usaha koperasi akses ke permodalan merupakan permasalahan tersendiri. Hailu (2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada koperasi-koperasi yang ada di Kota Semarang, meliputi 16 Kecamatan, antara lain; Banyumanik, Semarang Barat, Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Pedurungan, Semarang Selatan, Tembalang, Semarang Tengah, Semarang Timur, Tugu, dan Semarang Utara. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh secara langsung dari responden. Responden yang menjadi sampel merupakan pengurus koperasi dan pelaksana koperasi. Pengurus dan anggota koperasi dipilih untuk mewakili pengambil kebijakan di tingkat atas yang dibuat pada saat Rapat Anggota Tahunan

untuk mewakili bagaimana implementasi kebijakan yang sudah dibuat pada level teknis pelaksanaannya. data sekunder yang diperoleh berasal dari beberapa sumber antara lain: Biro Pusat Statistik Kota Semarang, Dinas Perkoperasian serta dinas-dinas yang melakukan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari informasi dan publikasi dari instansi daerah mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara bertahap (multi stage sampling), yaitu secara purposive akan ditentukan Koperasi- Koperasi di Kota Semarang yang menerima P3KUM. Sementara cluster random Sampling dipilih untuk menentukan pengurus dan anggota koperasi sebagai responden penelitian.

Pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dilakukan karena beberapa pertimbangan, antara lain; usaha produktif berada dalam wadah koperasi, pernah menerima dana P3KUM, sudah berbadan hukum sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2010 dan memiliki kelengkapan koperasi (pengurus dan anggota koperasi).

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode Cooperative Capacity Assessment (CCA). Metode Cooperative Capacity Assessment (CCA) yaitu suatu pendekatan untuk mendapatkan data dan informasi serta penilaian untuk mendorong kinerja dan pendewasaan suatu koperasi secara partisipatif.

Dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan metode CCA dilakukan penilaian hasil dengan menggunakan indeks kapasitas sebagai pembobot koefisien (score) organisasi. Analisis data mulai dilakukan sejak mulai pengumpulan data sampai penulisan berakhir. Adapun tahapan yang dilakukan; pertama, informasi dan data yang berhasil dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan per institusi atau per koperasi. Kedua, Open coding. Pada tahap ini peneliti berusaha memperoleh sebanyak-banyaknya

variasi data yang terkait dengan objek penelitian. Open coding meliputi proses merinci, memeriksa, membandingkan, dan mengkonseptualisasikan data, serta mengkategorikan data.

Selanjutnya Axial coding. Pada tahap ini hasil yang diperoleh dari open coding diorganisir kembali berdasarkan kategori dan dilakukan analisis hubungan antara kategori untuk mendapatkan gambaran utuh tentang sebuah kejadian. Keempat, Selective coding. Pada tahap ini data disesuaikan lagi relevansinya dengan objek penelitian yang kemudian memaknai data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian kinerja koperasi dari aspek organisasi dan kelembagaan, ada 6 aspek yang dilihat; (1) Visi dan misi, (2) Legalitas badan usaha, (3) Struktur koperasi, (4) Manajemen organisasi (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), (6) Keuangan, (7) Sarana dan Prasarana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode Cooperative Capacity Assessment (CCA), diperoleh hasil sebagai berikut;

Visi dan misi organisasi mampu dipahami arti pentingnya dalam sebuah koperasi. Hal ini terlihat dari 25 koperasi yang menjadi responden, 20% koperasi memiliki penilaian kinerja yang baik sekali dan 80% lainnya baik. Artinya visi dan misi lembaga sudah dibuat dan sangat jelas dipahami oleh semua perangkat koperasi.

Keberadaan visi dan misi tersebut dapat diturunkan menjadi rencana-rencana strategis yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan di seluruh stakeholder.

Legalitas badan usaha juga sudah dipenuhi oleh koperasi. Dari hasil penelitian terlihat bahwa ada 56% koperasi yang memiliki penilaian kinerja baik sekali dan 44% memiliki penilaian kinerja baik. Artinya koperasi sudah memiliki AD/ART yang tertulis dengan sangat jelas dan mampu dipahami oleh semua perangkat koperasi sehingga dapat digunakan sebagai panduan operasional lembaga. Selain itu, kelengkapan administrasi pendirian (Akte Notaris, NPWP, SIUP, SITU, TDP, dsb) juga sudah dimiliki. Surat-surat tersebut memang penting untuk dimiliki karena merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan pada saat mereka mengajukan diri sebagai penerima dana P3KUM.

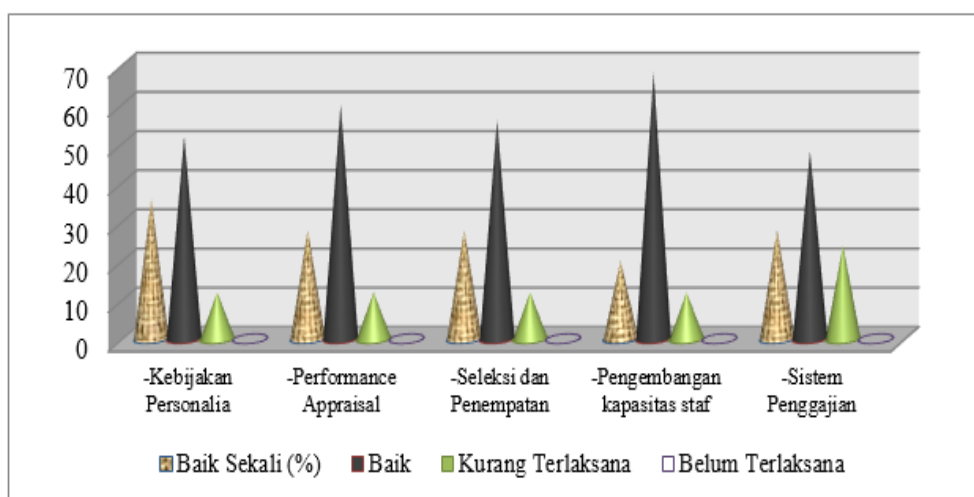
Pengembangan sumber daya manusia menjadi komponen yang penting dalam penilaian kinerja koperasi. Penyebabnya karena dalam Peraturan Menteri Negara UKM RI No08/Per/M.KUKM/II/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan P3KUM Pola Konvensional disebutkan bahwa, salah satu tujuan digulirkannya program tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas staf koperasi menjadi prioritas. Hal ini terlihat dari

Tabel 1. Organisasi dan Kelembagaan Koperasi

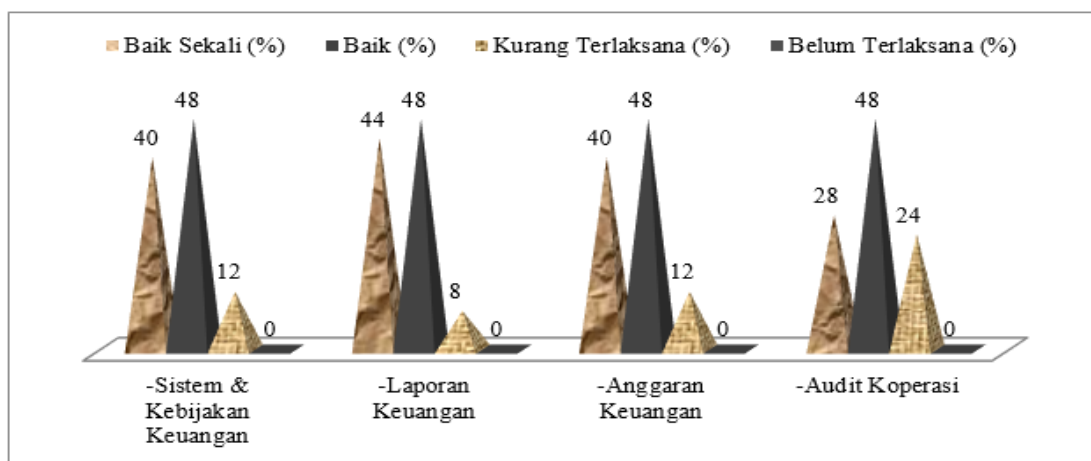
Aspek	Baik Sekali	Baik	Kurang	Belum Terlaksana
1. Visi & Misi	20%	80%	0%	0%
2. Legalitas Badan Usaha	56%	44%	0%	0%
3. Struktur Koperasi	52%	40%	8%	0%
4. Manajemen Organisasi	24%	72%	4%	0%
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia	24%	64%	12%	0%
6. Keuangan	40%	48%	12%	0%
7. Sarana dan Prasarana	24%	60%	16%	0%

Sumber : Data Primer diolah



Gambar 1. Penilaian Kinerja Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber : Data diolah



Gambar 2. Penilaian Kinerja Aspek Keuangan

Sumber : Data diolah

mayoritas koperasi yang menjadi responden menunjukkan kinerja yang baik (68%), meski ada yang kurang memberi perhatian pada pengembangan kapasitas staf (12%). Lihat Gambar 4.1. Artinya sebagian besar koperasi sudah memiliki kemampuan profesional di bidangnya masing-masing. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari koperasi, mereka melakukan perencanaan yang jelas tentang pengembangan profesionalisme stafnya. Caranya dengan memberi fasilitas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas personilnya.

Penilaian kinerja koperasi dari aspek keuangan menunjukkan bahwa hampir seluruh responden sudah melakukan sistem

keuangan dengan baik. Kinerja keuangan adalah hasil kegiatan koperasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Hasil kegiatan perusahaan harus dibandingkan dengan laporan keuangan periode masa lalu, laporan rugi laba dan neraca dan rata-rata kinerja keuangan sejenis. Fadli (2012). Dari kriteria sistem & kebijakan keuangan, laporan keuangan serta anggaran keuangan terlihat bahwa kinerja koperasi-koperasi tersebut sudah sangat baik. Ini terlihat dari hasil penilaian kerjanya yang mencapai angka antara 40- 44% dari jumlah seluruh responden (Gambar 1). Artinya sudah ada 10-11 koperasi yang memiliki kebijakan keuangan yang jelas dan mudah diterapkan.

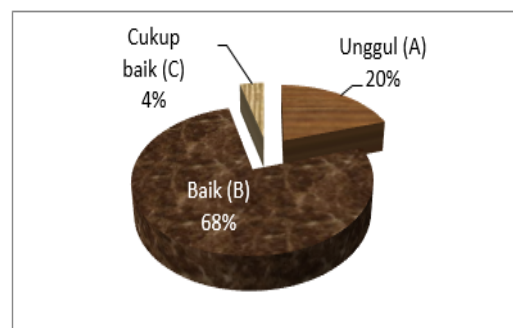
Adanya sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi koperasi koperasi yang berlaku (PSAK) mendukung keberadaan dari sistem keuangan pada koperasi tersebut. Aspek yang perlu diberi perhatian adalah masalah audit koperasi, meski kinerjanya sudah relatif baik, namun masih ada 24% kurang terlaksana dengan baik. Perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh dan atau dalam aspek- aspek tertentu saja. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan audit, maka koperasi akan lebih transparan dan hasil audit juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi.

Penilaian kinerja dari aspek manajemen organisasi menunjukkan bahwa mayoritas menunjukkan kinerja yang baik, terutama pada aspek pelaksanaan RAT (68%) dan sistem informasi pelaporan (6%). Artinya sebagian besar sudah menyadari bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) penting untuk diadakan secara rutin sebagai media untuk berkomunikasi dan evaluasi diri. Selain alasan tersebut, pada saat RAT juga dapat dilakukan penyusunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana- rencana strategis koperasi.

Sistem informasi dan pelaporan juga sudah berjalan baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah memiliki sistem atau mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah untuk diterapkan, meski masih perlu dilakukan optimalisasi dalam penerapannya.

Aspek prosedur administrasi menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan. Meskipun ada 7 koperasi (28%) yang memiliki kinerja baik sekali dan 12 koperasi (48%) memiliki kinerja baik, tapi ada 6 koperasi (24%) yang memiliki kinerja kurang baik. Aspek prosedur administrasi ini tercermin dari adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Apabila penilaian kinerjanya menunjukkan kurang terlaksana dengan baik, ini berarti koperasi belum memiliki SOP. Jika sudah ada, maka SOP yang telah dibuat kurang dapat diimplementasikan sehingga perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh dan atau dalam aspek- aspek tertentu saja.

Hasil evaluasi kinerja dari aspek organisasi dan kelembagaan koperasi dengan menggunakan Metode Cooperative Capacity Assessment (CCA) terlihat bahwa dari 25 koperasi yang menjadi responden, baru 5 koperasi yang masuk kategori Unggul (Nilai rata- rata 4). Artinya baru ada 5 koperasi yang memiliki unsur- unsur organisasi dan kelembagaan yang menunjang ke arah sistem yang terpadu demi peningkatan kinerja koperasi. Kebijakan yang dibuat di atas dalam RAT, secara tepat dapat diimplementasikan oleh para pelaksana sampai tingkat yang paling bawah. Selain visi misi, legalitas kelembagaan dan struktur koperasi, unsur- unsur dalam manajemen organisasi seperti pelaksanaan RAT, prosedur administrasi, dan sistem informasi pelaporan, secara umum, juga sudah tertata dengan baik sekali. Unsur lainnya seperti pengembangan sumber daya manusia, sistem dan kebijakan keuangan serta sarana dan prasarana, juga sudah ada, tinggal dipertahankan tingkat efektivitas penerapannya.



Gambar 4. Evaluasi Kinerja Organisasi dan Kelembagaan Koperasi

Sumber : Data diolah

Sementara mayoritas koperasi yaitu 19 buah (68%) masuk kriteria baik (nilai rata-rata 3). Sisanya yaitu 1 koperasi memiliki kriteria cukup baik (4%). Masih adanya koperasi yang memiliki nilai cukup baik disebabkan karena ada perbedaan persepsi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dari penelitian teridentifikasi bahwa di tingkat pengambilan keputusan (policy maker), unsur- unsur organisasi dan kelembagaan sudah ada, namun perlu

Tabel 2. Penilaian Kinerja Manajemen Organisasi

Aspek	Baik Sekali	Baik	Kurang	Belum Terlaksana
Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	32%	68%	0%	0%
Prosedur administrasi	28%	48%	24%	0%
Sistem Informasi dan Pelaporan	32%	64%	4%	0%

Sumber : data diolah

dilakukan perbaikan secara menyeluruh dan atau dalam aspek- aspek tertentu yang masih belum optimal. Sementara di tingkat pelaksana (staf dan karyawan), unsur- unsur organisasi dan kelembagaan yang ada masih belum optimal dalam penerapannya.

Sebagai pelaksana program P3KUM, koperasi memiliki peran yang besar dalam membantu program pemerintah tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari P3KUM dapat tercapai. Adapun tujuan dari P3KUM adalah; Memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan KSP/USPKoperasi; Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan; Dan memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut, diperlukan kelayakan usaha koperasi. Dalam Peraturan Menteri Negara UKM RI No08/Per/M.KUKM/II/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan P3KUM Pola Konvensional juga disebutkan bahwa, kelayakan usaha KSP/USP-Koperasi adalah analisa usaha yang didasarkan atas penelitian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penilaian kinerja dan kelayakan usaha KSP/USP-Koperasi sebagai penerima dana bergulir P3KUM.

Berdasarkan penilaian kinerja secara keseluruhan dengan menggunakan Cooperative Capacity Assessment (CCA) menunjukkan bahwa dari 25 koperasi yang menjadi responden, hanya ada 1 koperasi (4%) yang menunjukkan kinerja dan kelayakan usaha baik sekali. Artinya

koperasi ini mampu menjalankan perannya dengan baik karena memiliki kapasitas kelembagaan yang sudah optimal. Yang perlu dilakukan adalah mempertahankan tingkat efektivitas penerapan dari masing-masing aspek yang dinilai.

Sedangkan 21 koperasi (84%) memiliki kinerja dan kapasitas koperasi yang baik. Artinya meski sudah mampu menjalankan perannya sebagai penyalur dana P3KUM, tetapi ada beberapa aspek yang perlu dilakukan optimalisasi dalam penerapannya. Salah satunya adalah aspek kelembagaan dan organisasi karena memiliki pembobot yang paling besar yaitu 3. Alasan yang melandasinya. Pertama, karena aspek kelembagaan dan organisasi koperasi serta usaha koperasi diibaratkan sebagai sebuah pondasi dalam 'bangunan' koperasi. Kedua, karena salah satu tujuan dari adanya program P3KUM adalah untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan.

Ada 3 koperasi (12%) yang memiliki kinerja dan kelayakan usaha yang cukup baik. Artinya, aspek- aspek yang dinilai perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh dan atau dalam aspek- aspek tertentu saja yang kinerjanya kurang. Hal ini perlu dilakukan karena penguatan lembaga secara internal perlu dilakukan sebelum mereka mendukung program P3KUM untuk perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Dampak pelaksanaan program P3KUM terhadap koperasi penyalur, baik dari jumlah anggota, modal maupun jumlah aktifitas koperasi secara keseluruhan, dapat dilihat dari aspek permodalan pada usaha koperasi, pelayanan, dan partisipasi anggota. Koperasi dengan nilai kinerja dan kelayakan

usaha yang baik sekali (unggul) dan baik, relatif memiliki poin yang tinggi pada ketiga aspek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelayanan yang bagus dan optimal dari koperasi mengakibatkan banyak manfaat yang akan didapatkan oleh anggota koperasi. Jika anggota merasakan manfaat yang besar maka secara otomatis mereka akan semakin aktif berpartisipasi dalam melakukan aktivitas dalam koperasi. Salah satu caranya adalah dengan penumpukan modal. Jadi koperasi yang memiliki kinerja dan kelayakan usaha yang unggul dan baik, memiliki peningkatan dan penambahan modal usaha dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, koperasi tersebut mengalami peningkatan aset usaha koperasi.

SIMPULAN

Dengan menggunakan metode Cooperative Capacity Assessment (CCA) dapat diketahui bahwa dari 25 koperasi yang menjadi responden, baru 5 koperasi yang masuk kategori Unggul (Nilai rata-rata 4), 21 koperasi (84%) memiliki kinerja dan kapasitas koperasi yang baik, serta ada 3 koperasi (12%) yang memiliki kinerja dan kelayakan usaha yang cukup baik. Semakin baik kinerja yang dimiliki oleh sebuah koperasi, maka akan semakin layak dia sebagai penyalur dana program P3KUM. Kelayakan usaha ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan dari program P3KUM yaitu Memberdayakan usaha mikro; Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan; Dan memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Keberadaan program P3KUM memberikan dampak positif terhadap kinerja dan kelayakan usaha sebuah koperasi. Adanya tuntutan untuk menjadi lembaga yang kredibilitas, mandiri dan sehat merupakan tujuan yang ingin dicapai, selain keinginan untuk memberikan pelayanan yang prima bagi anggotanya. Dampak positif ini terlihat pada penilaian kinerja dari aspek permodalan koperasi

yang menyatakan bahwa lebih dari 75 % koperasi menyatakan bahwa adanya program P3KUM mampu meningkatkan modal usaha dan peningkatan aset dari tahun sebelumnya. Selain itu sebagai koperasi yang memiliki unit simpan pinjam, dimana unsur kepercayaan dan kemampuan menjadi kunci utama, akses terhadap permodalan juga menunjukkan kinerja yang positif (80%). Hal ini juga turut mendorong penambahan modal dari pihak ketiga. Secara keseluruhan bertambahnya modal ini, akan berdampak pada semakin banyaknya manfaat yang akan diterima oleh anggota. Dengan didukung pelayanan yang bagus, maka akan semakin bertambah banyak anggota yang berpartisipasi secara aktif, khususnya partisipasi modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, Uus Md. et al. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Karyawan Kantor Kementerian Agama Karawang. *Jurnal Manajemen* Vol 9 No 4 Juli 2012
- Goener, Sally J. A., Bernard Lietaer B., dan Robert E. Ulanowicz. (2009). Quantifying economic sustainability: Implications for free-enterprise theory, policy and practice. *Ecological Economics* 69 (2009) 76-81
- Hailu, Getu., dan Ellen Goddard. (2009). Sustainable Growth and Capital Constraints: The Demutualization of Lilydale Co-operative Ltd. *Journal of Cooperatives* Vol. 23 2009 Page 116-129
- Ismangil, Wagiono., dan Priono. (2006). Menumbuhkembangkan Kewirausahaan Koperasi Melalui Pengembangan Unit Usaha yang Fleksibel dan Independen, *Infokop* Nomor 29 Tahun XXII, 2006
- Lesakova, Lubica. (2009). Innovations in Small and Medium Enterprises in Slovakia. *Acta Polytechnica Hungarica*, Vol. 6, No. 3, 2009
- Megawati, Melia Meldy. (2009). Hubungan Motivasi dan Partisipasi Anggota Koperasi Dengan Peningkatan Hasil Usaha (SHU) Pada KPRI "Binawarga" Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, website <http://etd.eprints.ums.ac.id/4961/1/A210050152.pdf>
- Mulyadi., & Jhonny S. (2001) Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen : Sistem Pelipatgandaan Kinerja. Yogyakarta : Aditya Media
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan menengah Republik Indonesia, 2007, Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional, Nomor: 08/Per/M.KUKM/II/2007
- Purnomo, Joko, 2008, Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan

- dan Perkebunan Kabupaten Jepara, *Jurnal Manajemen Daya Saing*, Vol. 9 No. 1 Juni.
- Rahayu, Wening Parmi, 2005, Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi KPRI Harum Kec. Punung, Kab. Pacitan, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Volume 6 No 3, Oktober 2005, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/6305451456.pdf> diunduh tanggal 6 September 2011
- Riani, Eli Dewi, 2007, Kinerja Koperasi Berdasarkan Kep. Men. No. 129/ KEP/ M. KUKM/XI / 2002, Hambatan, Permasalahan dan Implementasinya (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Se- Kabupaten Pematang), UNNES, Skripsi, Tidak dipublikasikan.
- Sinaga, Pariatman, 2004, Balanced Scorecard sebagai Pengukuran Kinerja Koperasi dan UKM, Apa Mungkin?, *Infokop* No 25 Tahun XX.
- Statistik Ekonomi Keuangan daerah Jawa Tengah, September 2009, Kantor Bank Indonesia Semarang.
www.depkop.go.id
<http://relawandesa.files.wordpress.com> diunduh tanggal 8 Februari 2013
<http://www.smecca.com> diunduh 11 Desember 2013